

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan di lingkup desa sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar. Dengan dasar tersebut maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk lembaga teknis dalam bentuk “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10). Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang teknis, untuk sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian dan kepala bidang teknis dibantu oleh masing-masing 3 (tiga) kepala seksi serta 2 tenaga fungsional arsiparis yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sekretariat
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum
 - Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Bina Pemerintahan Desa
 - Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Desa Adat
 - Seksi Penataan Desa, Desa Adat Dan Kelurahan
 - Seksi Bina Keuangan Dan Aset Desa
- c. Bidang Pengembangan Dan Kerjasama Desa
 - Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dan Desa Adat
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Seksi Kerjasama Desa
- d. Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat
 - Seksi Pelayanan Dasar Dan Perlindungan Sosial
 - Seksi Kelambagaan Adat Dan Budaya Masyarakat
 - Seksi Ketahanan Masyarakat

- e. Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Usaha Ekonomi Desa
 - Seksi Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Perdesaan
 - Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Adapun tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yang secara garis besar sebagai berikut :

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

b. Fungsi

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Program Dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 3 (tiga) program rutin dan 8 (delapan) program teknis yang secara keseluruhan terdiri dari 64 kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
- Pelayanan Rapat-Rapat, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

- Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

- Pengelolaan Perpustakaan kantor, Dokumentasi dan Publikasi
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- c. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA
- Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan
 - Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian
 - Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Pameran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan
 - Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan Adminsitirasi Keuangan
 - Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi
 - Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev
 - Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan dan Laporan
 - Identifikasi dan Kajian Pemberdayaan
 - Workshop Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Kabupaten dan Kota
 - Orientasi dan Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
- Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas)
 - Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan
- e. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
- Sosialisasi Pembentukan BUMDES
 - Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - Inventarisasi dan Identifikasi BUMDES
 - Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Kawasan Pedesaan
 - Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes
 - Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga
 - Workshop Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
- f. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
- Pembinaan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar

- Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia
- Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa
- Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat
- Sosialisasi Program dan Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat
- Sistem Informasi Kelembagaan Masyarakat
- Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Pada Laboratorium Lapang Provinsi

g. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

- Pembinaan dan Penguatan Otonomi Pemerintahan Desa
- Peningkatan SDM Aparatur Desa
- Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
- Pembinaan Pengelolaan Aset Desa Tingkat Provinsi
- Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Provinsi
- Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
- Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
- Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
- Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa
- Bimtek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa
- Orientasi Tugas Kepala Desa Terpilih Tingkat Provinsi
- Workshop Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Badan Kerjasama Antar Desa
- Bimrtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

h. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN

- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga
- Pembinaan dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Perencanaan Dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat
- Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- Pembinaan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga
- Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan/Keluarga

- i. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN KERJASAMA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (PROGRAM PENGELOLAAN SDA DAN PENDAYAGUNAAN TTG)
 - Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat Provinsi
 - Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional
 - Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL Berbasis Masyarakat
- j. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 - Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi
 - Pengembangan Potensi Desa Melalui Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional
 - Monev dan Konsultasi Pengendalian Pengawasan Pendamping Profesional
- k. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA
 - Pembinaan Keterampilan Kelembagaan Masyarakat bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Total jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan adalah 78 orang. Dari jumlah tersebut, secara struktural/ eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (eselon II), 5 orang eselon III yaitu 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 15 orang eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian 3 orang, dan Kepala Seksi 12 orang. Adapun untuk jabatan fungsional umum (staf) sebanyak 57 orang. Berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan IV sebanyak 22 orang, Golongan III sebanyak 44 orang dan Golongan II sebanyak 12 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari Doktor (S3) sebanyak 2 orang, Master (S2) 29 orang, Sarjana (S1) 30 orang, Ahli Madya (D3) 7 orang dan SMA sebanyak 10 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Uraian	Jabatan / Eselon	Jumlah (Org)	Pangkat / Golongan (Org)	Pendidikan (Org)	Keterangan
I	Dinas PMD					
	a. Kepala Dinas	Struktural / Eselon II	1	Pembina Utama Madya IV/d	S.2	
	b. Sekretaris	Struktural / Eselon III.a	1	Pembina Tingkat I IV/b	S.2	
	c. Kepala Bidang	Struktural / Eselon III.a	4	Pembina Tingkat I IV/b = 3 Pembina IV/a = 1	S.2 = 4	
	d. Kepala Seksi	Struktural / Eselon IV.a	12	Pembina IV/a = 9 Penata Tingkat I III/d = 2 Penata III/c = 1	S.3 = 1 S.2 = 10 S.1 = 1	
	e. Kepala Sub Bagian	Struktural / Eselon IV.a	3	Pembina IV/a = 2	S.2 = 3	

No.	Uraian	Jabatan / Eselon	Jumlah (Org)	Pangkat / Golongan (Org)	Pendidikan (Org)	Keterangan
	f. Staf	Fungsional Umum	55	Penata III/c = 1 Pembina IV/a = 5 Penata Tingkat I III/d = 8 Penata III/c = 16 Penata Muda Tk. I III/b = 11 Penata Muda III/a = 4 Pengatur Tk. I II/d = 3 Pengatur II/c = 6 Pengatur Muda Tk. I II/b = 1 Pengatur Muda II/a = 2	S.3 = 1 S.2 = 10 S.1 = 28 D.III = 7 SLTA = 9	
		Fungsional Arsiparis	2	Penata Muda Tk. I III/b = 1 Penata Muda III/a = 1	S.1 = 2	

No.	Uraian	DPMD (Org)	Keterangan
1	Jabatan/Eselon : Struktural ~ Eselon II ~ Eselon III ~ Eselon IV ~ Fungsional Umum (Staf) ~ Fungsional Arsiparis	1 5 15 55 2	
	Jumlah	78	
2	Golongan : ~ Golongan IV ~ Golongan III ~ Golongan II	22 45 11	
	Jumlah	78	
3	Pendidikan : ~ Doktor (S3) ~ Master (S2) ~ Sarjana (S1) ~ Ahli Madya (D3) ~ SMA	2 29 30 7 9	
	Jumlah	78	

4. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Untuk alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 anggaran pokok belanja langsung sebesar Rp. 19.694.180.000 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.405.668.990, kemudian pada anggaran perubahan tahun 2018 anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 24.244.180.000 atau bertambah sebesar Rp. 4.550.000.000 dari anggaran pokok sedangkan belanja tidak langsung pada anggaran perubahan tahun 2018 sebesar Rp. 8.627.278.863 atau naik

sebesar Rp. 221.609.873. Adapun realisasi anggaran tahun 2018 secara keseluruhan dengan total belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp. 32.871.458.863 dengan realisasi sebesar Rp. 31.998.137.511 atau sebesar 97,34%, untuk rinciannya dapat di lihat pada tabel berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Pagu Anggaran	%
	BELANJA DAERAH	32.871.458.863,00	31.998.137.511,00	873.321.352,00	97,34%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.627.278.863,00	8.464.963.932,00	162.314.931,00	98,12%
1	BELANJA PEGAWAI	8.627.278.863,00	8.464.963.932,00	162.314.931,00	98,12%
	Gaji dan Tunjangan	4.958.248.990,00	4.803.309.931,00	154.939.059,00	96,88%
	Gaji Pokok/Uang Representasi 1)	3.930.383.408,00	3.881.439.500,00	48.943.908,00	98,75%
	Tunjangan Keluarga	343.090.749,00	327.992.498,00	15.098.251,00	95,60%
	Tunjangan Jabatan 2)	290.672.000,00	252.740.000,00	37.932.000,00	86,95%
	Tunjangan Fungsional	156.919.500,00	151.835.000,00	5.084.500,00	96,76%
	Tunjangan Beras 1)	227.137.210,00	182.353.560,00	44.783.650,00	80,28%
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.794.389,00	6.901.961,00	2.892.428,00	70,47%
	Pembulatan Gaji	251.734,00	47.412,00	204.322,00	18,83%
2	Tambahan Penghasilan PNS	3.669.029.873,00	3.661.654.001,00	7.375.872,00	99,80%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.669.029.873,00	3.661.654.001,00	7.375.872,00	99,80%
	BELANJA LANGSUNG	24.244.180.000,00	23.533.173.579,00	711.006.421,00	97,07%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.486.192.000,00	1.382.524.192,00	103.667.808,00	93,02%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.400.000,00	262.379.573,00	86.020.427,00	75,31%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00	65.000.000,00	0	100,00%
	Pelayanan Rapat-Rapat, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1.072.792.000,00	1.055.144.619,00	17.647.381,00	98,36%
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD	1.752.375.000,00	1.738.010.500,00	14.364.500,00	99,18%
	Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran	577.175.000,00	575.130.000,00	2.045.000,00	99,65%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan	147.100.000,00	146.775.000,00	325.000,00	99,78%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Pagu Anggaran	%
	Mebeleur				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan kantor	326.500.000,00	324.550.000,00	1.950.000,00	99,40%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	349.500.000,00	343.297.500,00	6.202.500,00	98,23%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	0	100,00%
	Pengelolaan Perpustakaan kantor, Dokumentasi dan Publikasi	105.000.000,00	103.218.000,00	1.782.000,00	98,30%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	215.600.000,00	213.540.000,00	2.060.000,00	99,04%
3	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA	2.936.900.424,00	2.895.662.228,00	41.238.196,00	98,60%
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	96.783.400,00	93.783.400,00	3.000.000,00	96,90%
	Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian	878.220.000,00	875.101.781,00	3.118.219,00	99,64%
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Pameran Pemberdayaan Masyarakat	230.475.000,00	219.825.000,00	10.650.000,00	95,38%
	Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan	164.107.900,00	145.300.000,00	18.807.900,00	88,54%
	Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan Adminsitrasi Keuangan	122.600.000,00	122.600.000,00	0	100,00%
	Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi	125.000.000,00	124.000.000,00	1.000.000,00	99,20%
	Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev	735.234.724,00	734.028.547,00	1.206.177,00	99,84%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Pagu Anggaran	%
	Sosialisasi Penataan Usaha Keuangan Dan Laporan	101.980.000,00	101.480.000,00	500.000,00	99,51%
	Orientasi dan Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110.420.000,00	110.109.600,00	310.400,00	99,72%
	Identifikasi dan Kajian Pemberdayaan	150.000.000,00	148.665.000,00	1.335.000,00	99,11%
	Workshop Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Kabupaten dan Kota	222.079.400,00	220.768.900,00	1.310.500,00	99,41%
4	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	982.659.000,00	961.914.000,00	20.745.000,00	97,89%
	Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas)	230.232.000,00	211.652.000,00	18.580.000,00	91,93%
	Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	168.672.000,00	168.167.000,00	505.000,00	99,70%
	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan	583.755.000,00	582.095.000,00	1.660.000,00	99,72%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	2.826.282.000,00	2.806.600.601,00	19.681.399,00	99,30%
	Sosialisasi Pembentukan BUMDES	89.880.000,00	85.456.000,00	4.424.000,00	95,08%
	Monitoring, Evaluasi Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat	262.889.000,00	261.788.601,00	1.100.399,00	99,58%
	Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES	263.700.000,00	262.368.000,00	1.332.000,00	99,49%
	Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Kawasan Pedesaan	1.044.945.000,00	1.035.345.000,00	9.600.000,00	99,08%
	Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes	293.024.000,00	293.024.000,00	0	100,00%
	Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga	795.698.000,00	792.993.000,00	2.705.000,00	99,66%
	Workshop Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu	76.146.000,00	75.626.000,00	520.000,00	99,32%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Pagu Anggaran	%
6	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	2.342.517.076,00	2.336.193.403,00	6.323.673,00	99,73%
	Pembinaan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar	586.966.500,00	584.583.500,00	2.383.000,00	99,59%
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia	213.620.000,00	213.620.000,00	0	100,00%
	Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa	149.810.400,00	149.810.400,00	0	100,00%
	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat	374.425.176,00	374.417.100,00	8.076,00	100,00%
	Sosialisasi Program dan Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat	469.690.000,00	468.684.200,00	1.005.800,00	99,79%
	Sistem Informasi Kelembagaan Masyarakat	231.580.000,00	230.025.000,00	1.555.000,00	99,33%
	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Pada Laboratorium Lapang Provinsi	316.425.000,00	315.053.203,00	1.371.797,00	99,57%
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	7.717.748.000,00	7.661.787.680,00	55.960.320,00	99,27%
	Pembinaan dan Penguatan Otonomi Pemerintahan Desa	453.535.800,00	452.569.800,00	966.000,00	99,79%
	Peningkatan SDM Aparatur Desa	897.403.100,00	895.573.100,00	1.830.000,00	99,80%
	Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	200.193.000,00	199.453.000,00	740.000,00	99,63%
	Pembinaan Pengelolaan Aset Desa Tingkat Provinsi	605.489.000,00	587.747.000,00	17.742.000,00	97,07%
	Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Provinsi	563.640.000,00	562.290.000,00	1.350.000,00	99,76%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Pagu Anggaran	%
	Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	584.005.000,00	581.261.100,00	2.743.900,00	99,53%
	Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi	1.573.390.000,00	1.569.653.600,00	3.736.400,00	99,76%
	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa	762.723.100,00	753.938.080,00	8.785.020,00	98,85%
	Bimtek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa	596.790.000,00	589.490.000,00	7.300.000,00	98,78%
	Orientasi Tugas Kepala Desa Terpilih Tingkat Provinsi	294.000.000,00	286.783.000,00	7.217.000,00	97,55%
	Workshop Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	249.150.000,00	247.200.000,00	1.950.000,00	99,22%
	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Badan Kerjasama Antar Desa	497.325.000,00	496.125.000,00	1.200.000,00	99,76%
	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	440.104.000,00	439.704.000,00	400.000,00	99,91%
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN	1.166.246.500,00	1.155.804.277,00	10.442.223,00	99,10%
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	955.891.500,00	954.599.277,00	1.292.223,00	99,86%
	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Perencanaan Dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat	47.040.000,00	47.040.000,00	0	100,00%
	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	72.805.000,00	63.655.000,00	9.150.000,00	87,43%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Pagu Anggaran	%
	Pembinaan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga	43.810.000,00	43.810.000,00	0	100,00%
	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Peningkatan Derjat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan/Keluarga	46.700.000,00	46.700.000,00	0	100,00%
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN KERJASAMA TEKNOLOGI TEPAT GUNA	1.632.549.000,00	1.205.430.200,00	427.118.800,00	73,84%
	Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat Provinsi	1.093.160.000,00	720.620.000,00	372.540.000,00	65,92%
	Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional	492.116.000,00	437.837.200,00	54.278.800,00	88,97%
	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL Berbasis Masyarakat	47.273.000,00	46.973.000,00	300.000,00	99,37%
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	797.906.000,00	788.105.498,00	9.800.502,00	98,77%
	Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi	136.315.000,00	134.665.000,00	1.650.000,00	98,79%
	Pengembangan Potensi Desa Melalui Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional	315.506.000,00	311.468.798,00	4.037.202,00	98,72%
	Monev dan Konsultasi Pengendalian Pengawasan Pendamping Profesional	346.085.000,00	341.971.700,00	4.113.300,00	98,81%
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA	602.805.000,00	601.141.000,00	1.664.000,00	99,72%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Pagu Anggaran	%
	Pembinaan Keterampilan Kelembagaan Masyarakat Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	602.805.000,00	601.141.000,00	1.664.000,00	99,72%
	JUMLAH	32.871.458.863,00	31.998.137.511,00	873.321.352,00	97,34%

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai pada Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) Misi, yang sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya kualitas Kemakmuran ekonomi, Kesejahteraan sosial dan Kelestarian lingkungan dan 7 (Ketujuh) yaitu Meningkatkan Perwujudan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih . Oleh karena itu, dalam pencapaiannya, maka sasaran pembangunan diletakkan pada :

- 1) Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota
- 2) Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
- 3) Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa.

Realisasi sasaran strategis “Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota” (sasaran 10) dari RPJMD dari kurun waktu 2 tahun terakhir sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	
			2017	2018
1	Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota	Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	2.870 RTM	3.020 RTM

Tabel berikutnya menunjukkan tahapan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2 Tahun terakhir untuk pelaksanaan misi ke 7 “Meningkatkan Perwujudan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih” yang terdiri dari 2 sasaran yaitu Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat (sasaran 46) dan Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa (sasaran 47). Sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	
			2017	2018
1	Meningkatnya kekuatan	Jumlah Bumdes yang difasilitasi	1.073 BUMDes	1.482 BUMDes

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	
			2017	2018
	kelembagaan dan kemampuan masyarakat	Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	20 klp binaan LPM	1 klp binaan LPM
		Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Persentase LPM Berprestasi)	24.30%	6.25%
		Jumlah dan persentasi kelembagaan masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)	2.57%	0.15%
		Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	52 klp	43 klp
		Persentase PKK Aktif	97.72%	100%
		Persentase Posyandu Aktif	99.53%	99.89%

Sementara itu sasaran “Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan Pemerintahan Desa” (sasaran 47) dari RPJMD realisasinya dapat dilihat dari table berikut ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	
			2017	2018
1	Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa berstatus swasembada	81 desa Swasembada	89 desa Swasembada
		Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4.457 Aparat Pemerintah desa	5.179 Aparat Pemerintah desa

6. Kondisis Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Berdasarkan neraca asset yang juga menjadi sarana dan prasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 nilai akhir asset yang ada yaitu sebesar Rp. 38.371.904.250 dan nilai asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 10.787.525.950, neraca asset ini terdiri dari beberapa item jenis asset yang rinciannya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH	10.304.922.600	10.304.922.600	9.704.322.600	9.704.322.600	9.704.322.600
	Tanah	10.304.922.600	10.304.922.600	9.704.322.600	9.704.322.600	9.704.322.600
2	PERALATAN DAN MESIN	6.022.332.223	5.491.444.450	6.742.655.950	7.028.149.950	7.174.924.950
	Alat-alat besar	-	-	-	-	-
	Alat-alat Angkutan	2.068.100.600	2.120.550.200	2.999.631.700	2.999.631.700	2.999.631.700
	Alat Bengkel & Alat Ukur	4.133.750	-	-	-	-
	Alat Pertanian dan Peternakan	-	39.727.000	39.727.000	39.727.000	39.727.000
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	3.600.928.880	3.165.117.750	3.506.938.750	3.769.618.750	3.916.393.750
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	334.318.993	136.239.500	166.548.500	189.362.500	189.362.500
	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-
	Alat Laboratorium	-	-	-	-	-
	Alat Keamanan	14.850.000	29.810.000	29.810.000	29.810.000	29.810.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	8.342.098.250	9.309.843.250	9.481.293.250	9.808.233.250	10.341.063.250
	Bangunan Gedung	8.342.098.250	9.309.843.250	9.481.293.250	9.610.983.250	10.143.813.250
	Bangunan Monumen	-	-	-	197.250.000	197.250.000
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	10.037.568.950	10.062.538.950	10.136.638.950	10.136.638.950	10.136.638.950
	Jalan dan Jembatan	8.057.686.000	8.057.686.000	8.057.686.000	8.057.686.000	8.057.686.000
	Bangunan Air (Irigasi)	1.142.420.000	1.142.420.000	1.142.420.000	1.142.420.000	1.142.420.000
	Instalasi	730.662.950	755.632.950	829.732.950	829.732.950	829.732.950
	Jaringan	106.800.000	106.800.000	106.800.000	106.800.000	106.800.000
5	ASSET TETAP LAINNYA	59.735.455	2.405.000	24.050.000	24.050.000	24.050.000
	Buku dan Perpustakaan	20.945.455	-	-	-	-
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	38.790.000	2.405.000	24.050.000	24.050.000	24.050.000
	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-	-
6	BELANJA ASET LAINNYA	318.627.500	390.304.500	990.904.500	990.904.500	990.904.500
	Aset Tak Berwujud	318.627.500	390.304.500	990.904.500	990.904.500	990.904.500

N O	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Aset Lain-lain	-	-	600.600.000	600.600.000	600.600.000
	TOTAL	35.085.284.978	35.561.458.750	37.079.865.250	37.692.299.250	38.371.904.250

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 sarana dan prasarana terdiri dari bangunan/gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Bangunan/Gedung		
	a. Gedung Kantor I	1	Gedung Sekretariat (A)
	b. Gedung Kantor II	1	Gedung Bidang-Bidang
	c. Gedung Kantor III	1	Gedung Sub Bag Keuangan dan Perpustakaan
	d. Gedung Pusat Pelatihan	1	Gedung Pelatihan
2	Rumah Dinas		
	a. Rumah Dinas Kopel	4	Ditempati oleh pegawai DPMD
	b. Rumah Dinas Tunggal	4	Ditempati oleh pegawai DPMD
3	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil	10	Operasional Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Bidang/Kepala Sub Bagian dan staf
	b. Motor	19	

7. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi yaitu :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya laju perkembangan Desa, berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah desa	Minimnya peran Pemerintah Provinsi secara langsung dalam menginterfensi kemajuan perkembangan desa	Belum adanya kebijakan dan regulasi Pemerintah Provinsi terkait percepatan kemajuan dan perkembangan desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	sebanyak 2.255 desa : 119 Desa sangat tertinggal, Tertinggal 992, Berkembang 1089 dan Maju 55.		Cakupan wilayah dan jumlah desa yang cukup besar	
			Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa secara teknis terkait pada dua kementerian yang seringkali tidak berjalan seiring, sehingga koordinasi program tidak berjalan secara optimal	
			Rendahnya koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan data antar kabupaten/kota dan DPMD Provinsi Sulawesi Selatan	
		Belum optimalnya pembinaan penataan desa, penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa		Rendahnya kapasitas SDM aparatur pembina pemerintah desa
				Masih rendahnya penerapan SPM di desa sesuai dengan Permendagri No. 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
				Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset desa sebagai sumber pendapatan desa
				Masih rendahnya kapasitas BPD sebagai lembaga kontrol desa dan kemitraan antara pemerintah desa dengan BPD
		Masih kurangnya kerjasama antar desa		Minimnya fasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam kerjasama desa
				Kurangnya pemahaman pemerintah daerah atas pentingnya kerjasama desa
		Kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat terutama masyarakat hukum adat relatif masih rendah		Kurangnya kapasitas pengurus kelembagaan masyarakat dan kurang efektifnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat
				Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum maksimalnya data base SDA yang potensial dikembangkan dan kebutuhan masyarakat serta pembinaan pemanfaatannya
			Kurangnya pemanfaatan SDA dan TTG dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat
			Mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan belum berjalan efektif dan memberi implikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah
		Masih rendahnya pembangunan kawasan pedesaan, pendayagunaan SDA dan TTG serta perkembangan usaha ekonomi desa	Kurang berkembangnya lembaga ekonomi yang ada di masyarakat dan rendahnya kemampuan managerial pengelola lembaga ekonomi pedesaan dalam mengelola ekonomi desa
			BUMDes belum berjalan secara optimal dalam menunjang perekonomian di desa
			Belum terfasilitasinya berbagai lembaga ekonomi yang ada di desa dalam wadah BUMDes
			Kesenjangan pembangunan antar desa dalam satu daerah kabupaten masih tinggi
			Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan kawasan pedesaan

Adapun solusi untuk permasalahan yang ada diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan kedepannya akan berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memaksimalkan peran Pemerintah Provinsi dalam kemajuan perkembangan desa melalui regulasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur dan memaksimalkan integrasi dan sinergitas program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Mengoptimalkan pembinaan-pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota tentang penataan Desa, pelaksanaan administrasi Desa dan kelembagaan pemerintahan Desa.

3. Meningkatkan peran pemerintah Kabupaten dalam membentuk kerjasama desa dalam satu kabupaten dan kerjasama desa antar kabupaten.
4. Melakukan pembinaan yang lebih partisipatif kepada kelembagaan adat yang ada di Desa serta meningkatkan peran kelembagaan dalam menunjang kemajuan status Desa.
5. Memaksimalkan pembentukan kawasan perdesaan dan peran kawasan perdesaan dalam merangkul desa-desa yang menjadi ruanglingkupnya untuk bekerjasama dalam memajukan perekonomian masyarakat serta peran aktif pemerintah Kabupaten.
6. Melakukan pendataan dan pemetaan yang lebih akurat mengenai potensi-potensi sumberdaya alam yang ada di desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dan berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut sehingga saran dan kritik yang sifarnya membangun sangat kami harapkan, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 8 Februari 2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19601216198611 1 001